

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kualitas sumber daya manusia merupakan syarat penting untuk mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat peningkatan sebuah kapasitas dan potensi sumber daya manusia. Ada benang merah yang harus menghubungkan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian.

Harrod-Domar (Ma'ruf & Wihastuti, 2008, p. 46). Salah satu diantaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dinilai berdasarkan keadaan sebuah negara, apakah dari segi perekonomian negara tersebut sedang tumbuh atau melambat, atau bahkan mengalami sebuah resesi. Selain jumlah angka pengangguran, dapat dilihat dari segi ketimpangan atau sebuah distribusi pendapatan yang diterima Masyarakat di negara ini.

Sumber daya manusia di Indonesia menunjukkan kualitas bangsa. Pemerintah berupaya untuk membangun orang-orang berkualitas, siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam rangka meningkatkan kualitas citra bangsa. Usaha ini dapat dimulai sejak usia muda, yaitu melalui proses pendidikan. Salah satu tren (*trend*) besar saat ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks, termasuk kebutuhan akan pendidikan dalam berbagai bidang keterampilan.

Pada era teknologi manusia-mesin telah menjadi sangat sengit. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Seperti yang dapat diketahui, Indonesia telah terkena dampak fenomena 4.0. Mesin sudah mulai menggantikan semua aktivitas manusia. Manusia yang kompeten akan memiliki nilai jual yang tinggi di tempat kerja atau sebaliknya yaitu manusia yang tidak kompeten akan memiliki nilai jual yang rendah. Pada hakekatnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini juga merupakan salah satu faktor penentu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kecerdasan dan keterampilan manusia diasah dan diuji melalui pendidikan dalam menghadapi

dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Ada beberapa indikator perekonomian yang dapat menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara. Tingkat pengangguran adalah salah satunya. Menurut Sadono Sukirno (Franita & Fuady, 2019, p. 89) pengangguran ialah situasi dimana seseorang dalam Angkatan kerja ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukannya. Menurut Franita & Fuady (2019, p. 89) Pengangguran merupakan salah sesuatu yang tidak diinginkan, namun telah menjadi penyakit yang menyebar di berbagai negara karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengurangi jumlah pengangguran harus ada Kerjasama antara lembaga pendidikan, Masyarakat, dan pihak lainnya.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh para ahli di atas, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya laju perubahan Angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang memadai menyebabkan terjadinya pengangguran, dan Angkatan kerja yang terserap cenderung rendah, hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan. Dengan adanya penciptaan lapangan kerja oleh karena itu hanya menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Oleh karena itu, Todaro & Smith (Widayanti & Lestari, 2019, p. 3) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara diukur dari tiga nilai utama antara lain: (1) kapasitas Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) adanya peningkatan rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat dengan kepribadian dan (3) kapasitas Masyarakat untuk menggunakan haknya untuk memilih bebas dari jeratan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sangat kompleks untuk dibahas dan juga merupakan isu yang penting, karena pengangguran dapat dikaitkan dengan beberapa-indikator. Indikator yang mempengaruhi tingkat pengangguran merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, tingkat inflasi, dan upah yang berlaku.

Oleh karena itu, jika pertumbuhan ekonomi suatu Negara meningkat maka akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya akan menyeret upah. pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, maka pada tahap ini akan diikuti dengan tingkat upah. Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan status pekerjaan dan kegiatan informal, tasikmalaya termasuk

salah satu kota dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 150.491 ribu jiwa (46,43%). Tingginya persentase penduduk yang bekerja paruh waktu akan membantu menurunkan angka pengangguran di kota tasikmalaya.

.Menurut Badan Pusat Statistik kota Tasikmalaya (BPS) yang dilansir dalam (www.bps.go.id) yang diakses pada tanggal 21 November 2022 data ketenagakerjaan Penduduk yang bekerja sebanyak 324.099 orang, meningkat sebanyak 7.750 orang dari tahun 2021. Peningkatan kontribusi terbesar dari penyerapan penduduk bekerja terjadi pada lapangan pekerjaan Sektor Manufaktur meningkat 2,21% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan kontribusi terbesar adalah Sektor Jasa-jasa menurun 2,95% poin.

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Pada tahun 2022, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 35,19% (114.049 orang). Sementara distribusi terendah adalah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III sebanyak 2,79% (9.047 orang).kurangnya pemanfaatan pasokan tenaga kerja ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hasil Sakernas tahun 2022 sebesar 6,62%. Dari setiap 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 7 orang yang penganggur.

Dapat disimpulkan bahwa jumlah Angkatan kerja yang berpendidikan tinggi khususnya diploma masih tergolong rendah karena beberapa faktor antara lain, masih kurangnya kesadaran akan nilai pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga yang buruk. Sementara itu, sebagian dari masyarakat menganggur karena masih banyak angka pengangguran yang tinggi akibat ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan jumlah pencari kerja.

Dari permasalahan ada hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah khususnya Kota Tasikmalaya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat untuk mengurangi permasalahan yang ada. yaitu dengan memberikan program pengembangan keterampilan yang bertujuan dari program tersebut untuk menjadi penunjang generasi masa depan untuk memperoleh peluang memasuki dunia kerja.

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Menurut Undang – Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan nonformal menawarkan kepada masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan pengganti, pelengkap, atau penyempurna pendidikan formal. Hal ini juga berfungsi untuk membantu peserta mencapai potensi penuh mereka dengan menempatkan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan praktis serta membentuk sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan Masyarakat berorientasi pada peningkatan sebuah keterampilan dan membentuk Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) untuk menjawab kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penerapan dengan adanya sebuah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) melalui kursus yang berorientasi pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dimana pengembangnya berupa etos kerja. Pemerintah menyerahkan bantuan pembelajaran melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang dimana dan pelatihan bekerjasama dengan penyelenggara kursus. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan program pendidikan berorientasi layanan yang fokus membantu peserta memperoleh keterampilan kerja sehingga kompeten dalam bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja.

Dari hasil Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dapat memperoleh pekerjaan di dunia usaha manufaktur, industri jasa, industri rumahan (home industry) atau industri lainnya. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah LKP Yuwita yang bekerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan khususnya program pendidikan keterampilan profesi tata kecantikan kulit tingkat II . pertumbuhan dan perkembangan lembaga kursus di kalangan cukup pesat. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan akan keterampilan dalam dunia kerja sebagaimana tuntutan masyarakat untuk memiliki keterampilan dalam dunia kerja.

Industri kecantikan kulit merupakan prospek yang sangat menjanjikan baik untuk usia remaja hingga usia dewasa memerlukan kecantikan kulit dan juga tidak melihat dari segi gender baik perempuan ataupun laki-laki bisa memerlukan kesehatan kulitnya terutama wajah.

Oleh karena itu, layanan pendidikan sangat penting bagi mereka yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kecantikan kulit, termasuk fasilitas kursus dan pelatihan tata kecantikan kulit. Melihat pengelolaan fasilitas kursus tata kecantikan kulit yang mempersiapkan lulusannya agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di klinik atau salon kecantikan, pihak pengelola terus berupaya menjadikan fasilitas kursus lebih aktif di masyarakat, apapun faktornya.

Setiap peserta pelatihan yang mengikuti program tata kecantikan kulit di LKP Yuwita diharapkan lulus dengan kompeten. Dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan peserta pelatihan pada bidang tata kecantikan kulit agar mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri, LKP Yuwita akan memberikan informasi peluang kerja bagi setiap lulusan pelatihan tata kecantikan kulit dengan mengikuti program pendidikan kecakapan kerja (PKK). Lulusan dari program PKK bidang tata kecantikan kulit diharapkan mampu memantapkan bakatnya di bidang tata kecantikan kulit yang dimana nantinya secara perlahan untuk menembus persaingan di dunia industri. Pelatihan disini sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu dengan menawarkan berbagai praktik untuk memperdalam pelatihan dan tujuan dari pelatihan itu sendiri, sehingga setiap individu menjadi lebih dinamis, kreatif dan mampu bersaing dan berkembang lebih jauh di dunia industri, serta membuka peluang penciptaan lapangan kerja. LKP Yuwita di sini merupakan lembaga yang dapat membantu Masyarakat yang mau memiliki pekerjaan dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan namun terkendala dengan skill oleh karena itu lkp yuwita menjadi solusi agar masyarakat dapat mempunyai pekerjaan dengan cara mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh LKP Yuwita. Berdasarkan fakta di lapangan, penyerapan lulusan dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

masih kurang membantu untuk penyerapan lulusan sehingga penempatan kerja masih tergantung dari dunia industri.

. Berangkat dari pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa pengelolaan lembaga kursus pelatihan Yuwita untuk menyiapkan lulusannya dapat diterima oleh perusahaan, serta proses cara pengelola terus mengeksistensikan lembaga kursus latihan dikalangan masyarakat terlepas dapat mengikuti pelatihan tanpa faktor biaya. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YUWITA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Ditemuinya lulusan yang kompeten namun belum bekerja.
- b. Masih kurang ideal pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Kerja
- c. Masih Belum adanya ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak kemitraan untuk mendukung lulusannya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu untuk mengetahui implementasi program pendidikan kecakapan kerja melalui pelatihan di lembaga kursus yuwita?

1.4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi program pendidikan kecakapan kerja melalui pelatihan di lembaga kursus yuwita.

1.5. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat dan kegunaan sesuai dengan harapan peneliti, dengan demikian peneliti menyampaikan beberapa manfaat dalam penelitian di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dunia pendidikan masyarakat, khususnya mengenai pelatihan yang diterapkan guna meningkatnya keterampilan peserta didik.
- 2) Untuk jadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan pada penelitian di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan Yuwita penelitian ini memberi wawasan untuk perkembangan lembaga dalam meningkatkan kualitas lulusan program kecakapan kerja
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat diharapkan sebagai referensi keilmuan untuk jurusan pendidikan masyarakat dalam bidang pelatihan.

1.6. Definisi Operasional

Penelitian akan memberikan definisi-definisi istilah dalam rangka mengantisipasi kesalahan dalam mengartikan istilah dari pembahasan penelitian diantaranya:

- a. Implementasi merupakan pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan yang tersistematis dengan dengan baik dengan tujuan mencari keuntungan (benefit). Adanya implementasi mengharuskan organisasi atau instansi yang membuat kegiatan membuat rancangan atau perencanaan yang melibatkan sumber daya manusia
- b. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Program Pendidikan Kecakapan Kerja adalah alternatif solusi yang dapat di pertimbangkan untuk menghadapi tantangan spektrum pekerjaan/ profesi pada era ekonomi kreatif. Layanan pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengembangkan suatu *skill* atau keterampilan kerja masyarakat agar memilih keterampilan pada bidangnya. Program PKK adalah layanan sebuah program pendidikan melalui kursus dan pelatihan yang dimana diharapkan untuk menghasilkan lulusan kompeten pada bidang keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan

dunia industri sehingga dapat memanfaatkan secara optimal dengan adanya peluang- peluang kerja yang terbuka di era masyarakat ekonomi ASEAN.

- c. Pelatihan adalah proses memperoleh pengetahuan secara sistematis dan dalam jangka waktu singkat, termasuk menetapkan tujuan pencapaian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dengan memberikan suatu kegiatan pembelajaran. Selain itu, program pelatihan juga dapat menghasilkan Setiap lulusan dari lembaga pelatihan harus menyiapkan bukti adanya sertifikasi, hal tersebut dapat memberikan peserta pelatihan untuk melamar pekerjaan atau membuka tempat pelatihan dengan modal keahlian dan pengetahuan yang didapatkan saat mengikuti sebuah pelatihan berlangsung.
- d. Lembaga kursus adalah lembaga yang terdapat beberapa keterkaitan nyata antara normal, nilai, dan keyakinan, serta fokus pada tuntutan sosial, serta sejumlah kegiatan yang krusial dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang dimaksud oleh lembaga tersebut. untuk melaksanakan program lembaga sendiri telah menyelenggarakan kursus dan pelatihan yang merupakan tata cara pembelajaran dari segi pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran tersebut lebih mengutamakan praktek karena lebih dalam untuk pembelajaran dibandingkan teori, sehingga menghasilkan pembelajaran yang cukup cepat dan fokus pada hasil.